

ABSTRAK

Pengisian jabatan kepala desa dilakukan dengan pemilihan langsung oleh masyarakat desa setempat hal tersebut dilakukan demi tercapainya maksud yang terkandung didalam undang-undang desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum putusan nomor 37/G/2020/PTUN. Surabaya terhadap keputusan bupati sumenep berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan apabila tidak dilaksanakan. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dengan memberikan penjelasan dari berbagai aspek seperti Pustaka hukum, teori serta aturan aturan terkait. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konsep yang berhubungan dengan isu hukum. Jika dalam penyelesain perselisihan pemilihan kepala desa bupati tidak mengeluarkan keputusan berdasarkan putusan pengadilan maka dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 71 ayat (3) dan 72 ayat (1), serta mengenai sanksi tersebut dijelaskan dalam pasal 80 ayat (2).

Kata Kunci : Putusan, Keputusan, Administrasi Pemerintahan

ABSTRACT

Admission filling position headman performed with election direct by society village local that matter conducted by achieved the meaning contained in the ordinance village. this research as a purpose for detect result law verdict number 37/G/2020/PTUN Surabaya about judgment officer in charge of a regency Sumenep be based on statute number 30 year 2014 about administration government if not held. research methods used are research law normative with resort to approach legislation (statute approach). in give explanation from various aspect such as divining manual law, theory with rules related. with make use of approach law and concept which are related with issue law. if in arrangement disagreement election headman regency not discharge judgment be based on verdict jurisdiction then in ordinance number 30 year 2014 about government administration as explained in article 71 paragraph 3 and 72 paragraph 1, with concerning sanction mentioned explained article 80 paragraph 2.

Keywords : verdict, judgment, government administration

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan.....	4
1.5 Keaslian.....	5
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis Penelitian.....	9
1.6.2 Metode Pendekatan.....	9
1.6.3 Bahan Hukum.....	10
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	14

BAB II BERLAKUNYA PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

2.1 Teori Kewenangan.....	15
2.2 Teori Tujuan Hukum.....	19
2.3 Teori Keabsahan Keputusan.....	21
2.4 Putusan Peradilan Tata Usaha	23
2.5 Pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara.....	27
2.6 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.....	40

BAB III KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN PEMILIHAN KEPALA DESA

3.1 Akibat hukum jika bupati tidak melaksanakan putusan tata usaha negara.....	45
--	----

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	64
4.2 Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA.....	66
----------------------------	-----------